

JURNAL HAM

VOLUME 9 NOMOR 1, JULI 2018

FOKUS DAN RUANG LINGKUP

Jurnal HAM merupakan majalah ilmiah yang memfokuskan pada bidang Hak Asasi Manusia.

LEMBAGA PENERBIT

Jurnal HAM diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

p-ISSN 1693-8704

e-ISSN 2579-8553

Edisi jurnal elektronik tersedia pada:

<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham>

INDEKSASI

Google Scholar; Indonesian Scientific Journal Database (ISJD); Public Knowledge Project (PKP) Index; CiteU-Like; Academic Research Index (Research Bib); Zotero; Indonesia One Search; Neliti; dan Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

FREKUENSI PUBLIKASI

Terbit sebanyak dua kali dalam setahun, pada bulan Juli dan Desember.

KETENTUAN BIAYA PUBLIKASI ARTIKEL

Setiap artikel yang disampaikan ke Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak dikenakan 'Biaya Pemrosesan Artikel'. Ini mencakup review mitra bestari, pengeditan, penerbitan, pemeliharaan dan pengarsipan, dan memungkinkan akses langsung ke versi teks lengkap dari artikel.

ALAMAT KORESPONDENSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan H.R. Rasuna Said
Kavling 4-5, Jakarta Selatan
12940

Telepon 021- 2525015

Faksimili 021-2526438

Laman : www.balitbangham.go.id

Email: ejournalham@gmail.com

Jurnal HAM Indexed by:



PKP|INDEX



zotero



JURNAL HAM

VOLUME 9 NOMOR 1, JULI 2018

Jurnal HAM merupakan majalah Ilmiah yang memuat naskah-naskah di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupa hasil penelitian, kajian dan pemikiran di bidang HAM. Jurnal HAM terbit secara berkala 2 (dua) nomor dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Pembina | : | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| 2. Pengarah | : | 1. Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM
2. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
5. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan |
| 2. Redaktur/Dewan Redaksi | : | 1. Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU
2. Firdaus, S.Sos., M.H. |
| 3. TimE-Journal
Journal Manager
Penyunting/Editor | : | Fitriyani, S.H., M.Si.
1. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.
2. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
3. Harison Citrawan, S.H., L.L.M. |
| 4. Sekretaris | : | 1. Asmadi, S.H.
2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. |
| 5. Tata Usaha | : | 1. Suwartono |
| 6. Teknologi Informasi dan Desain Layout | : | 1. Risma Sari, S.Kom., M.Si.
2. Machyudhie, S.T.
3. Agus Priyatna, S.Kom. |
| 7. Mitra Bebestari | : | 1. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
(Universitas Jenderal Soedirmana/Hukum Tata Negara)
2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
(Universitas Sebelas Maret/Hukum Pidana)
3. Dr. Sukirno, S.H., M.Si.
(Universitas Diponegoro/Hukum Adat; Hak Ulayat) |

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimili (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan

PT. Pohon Cahaya

Jl. Gedung Baru Nomor 18 Jakarta Barat (11440)
Telepon (021) 5600111; Faksimili (021) 5670340

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti : Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com serta wajib mengupload tulisan tersebut melalui Open Journal System (OJS) pada ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

UCAPAN TERIMA KASIH

KUMPULAN ABSTRAK

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat <i>(Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara)</i>	1 - 17
Penny Naluria Utami	
Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan <i>(Analysis Implementation of The Principle of Non-Discrimination in Regional Regulation in Education and Health Services)</i>	19 - 36
Nicken Sarwo Rini	
Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur <i>(Regional Government's Policy on the Protection and Respect to Indogenous People in Alor Regency The Province of East Tenggara Timur)</i>	37 - 49
Frichy Ndaumanu	
Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya <i>(Rejuvenation and Development of Urban Areas through Eviction Viewed from Human Rights Perspective in Surabaya City)</i>	51 - 68
Yuliana Primawardani	
Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Propinsi Banten Melalui Pelibatan Masyarakat dalam Perspektif HAM <i>(Supervision and Monitoring of Simultaneous Regional Head Election In the Province of Banten through Community Engagement in the Perspective of Human Rights)</i>	69 - 85
Donny Michael	

Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (<i>Agrarian Conflict in Maluku Viewed from the Perspective of Human Rights</i>).....	87 - 101
Okky Chahyo Nugroho	

BIODATA PENULIS

PEDOMAN PENULISAN

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga di tahun 2018 ini Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi pertama yaitu Jurnal HAM Volume 9 Nomor 1 Juli 2018. Seperti penerbitan pada volume sebelumnya, pada volume kesembilan dimuat 6 (enam) tulisan karya-karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Pada terbitan Volume 9 Nomor 1 Juli Tahun 2018, Jurnal HAM menerbitkan tulisan yang beragam dengan berbagai permasalahan HAM, yaitu penanganan kekerasan terhadap anak, penerapan prinsip non-diskriminasi pada peraturan perundang-undangan, penataan perkotaan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam perspektif HAM, serta masyarakat hukum adat. Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. Sukirno, S.H., M.Si., selaku Mitra Bebestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulils. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan Open Jurnal System maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Jakarta, Juli 2018

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH UNTUK MITRA BEBESTARI

Redaksi Jurnal HAM mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada mitra bebestari yang telah *review* artikel-artikel yang diterbitkan dalam Jurnal HAM Volume 9, Nomor 1, Edisi Juli 2018. Mitra bebestari tersebut yaitu:

1. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. (Universitas Jenderal Soedirmana/Hukum Tata Negara)
2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret/Hukum Pidana)
3. Dr. Sukirno, S. H., M. Si. (Universitas Diponegoro/Hukum Adat; Hak Ulayat)

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.

This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge

Penny Naluria Utami (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights*)

Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara

Human Rights Journal, Vol.9, Number 1, July 2018, page 1 - 17

Integrity and harmony in a happy and secure family are dreams of every wedded man and woman. Any violence will bring the feeling of insecurity to the members of the family. In preventing violence to children the state and the people must prevent, protect, and take actions in accordance with the laws. But the challenges has been the legal framework that is far from effective in preventing all forms of violence to children causing the rise of allegation that the law enforcement has failed. The problems are the factors causing the domestic violence to children and the solution to prevent such violence. This is aimed to explain the factors giving rise to violence to children and to seek the right solution to prevent the violence to children in order to create a safe nursing pattern. Using descriptive qualitative research method one could conclude that the parents' roles are important for the children development. Sometimes the cases that have occurred are known to all, but it is regarded as common practices and all tends to let it happen and happen again. Prevention may be made by identifying the parents that have high risk factor to cause violence to children. It is now the time to show the unseen and it is the time to stop violence to Children. I am a child protector and i would like to ask everybody to become a Child Protector. The more people who protect the farer the violence from children. It is recommended for the Ministry of Women Empowerment and Child Protection to immediately issue implementation guidelines and technical guidelines related to the public involvement as protector and watcher for children around their houses and Regional Government in the Province of West Nusa Tenggara to provide and create safe and comfortable surrounding for children to do their activities.

Keywords: Prevention, Violence, Child, Human Rights

Nicken Sarwo Rini (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights*)

Analysis Implementation of The Principle of Non-Discrimination in Regional Regulation in Education and Health Services

Human Rights Journal, Vol.9, Number 1, July 2018, page 19 - 36

Human Rights violation may be promoted by the laws whose contents substantially discriminative (containing restriction, abuse, exclusion that directly or indirectly discriminative on the grounds of religion, tribe, race, ethnicity, groups, social status, economic status, gender, language, political beliefs). This paper addresses two following issues: firstly, figuring out the categorization of discriminative forms in particular against the susceptible groups with respect to the advancement of the rights to education and health; secondly, Human Rights-based analysis to some provincial regulations with regard to the provisions of educational and health services. The conclusions in this paper is that there have been 3 forms of discriminations: economic, religion/beliefs, and social statuses. Based on the analysis on Human Rights issues, the contents of the provincial regulations fail to specifically regulate how the government will guarantee and ensure that the susceptible groups in accessing the education and health services without barrier, and also fail to prescribe the method of filing any complaints with regard to the Human Rights violation. Substantially, the non-discriminative principle should be implemented by protecting any movement challenging the discriminations, this may be materialized if the contents of the laws substantially provide for and regulate that susceptible group should have the right to access (physically and economically) the education and health services without obstacles and supported with prescription on the mechanism to file any complaints and claims for justice when their rights are violated.

Keywords: Implementation, Non-Discrimination, Education, Health, Regional Regulation

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.

This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge

Frichy Ndaumanu (Regional Office of Ministry of Law and Human Rights at Nusa Tenggara Timur)

Regional Government's Policies on the Protection and Respect to Indigenous People In Alor Regency, The Province of East Nusa Tenggara

Human Rights Journal, Vol. 9 Number 1, July 2018, page 37 - 49

Indigenous People are parts of susceptible group whose existence and position have neither been recognized nor placed at the equal status as legal subjects by the government. In every aspects of regional development planning the Indigenous People are often disregarded giving rise to disharmonious relationship between the Indigenous People and the Regional Government which in turn may lead to conflicts and to human rights violations. The objective of this paper is to promote reliable policies in recognizing and protecting the rights of the Indigenous People by the Regional Government through comprehensive and implementable regional legal products in particular in Alor Regency, the Province of East Nusa Tenggara. This research employs a juridical normative method. This paper employs juridical normative research method by means of library studies reviewing (in particular) secondary data and completed with interviews and discussions. From this paper it is concluded that a policy on regional legal products is required to respect and protect the Indigenous People in the form of a draft of regional regulation regarding recognition and protection of Indigenous People.

Keywords: Indigenous People, Recognition and Protection, Alor Regency

Yuliana Primawardani (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights)

Rejuvenation and Development of Urban Areas through Eviction Viewed from Human Rights Perspective in Surabaya City

Human Rights Journal, Vol. 9 Number 1, July 2018, page 51 - 68

Rejuvenation and development of city areas are one of the efforts by the Regional Government to rectify, structure and beautify the city. However, the realization sometimes leads to Human Rights violation due to the evictions involved, depriving the people from their title to their dwelling houses. This research employs qualitative method with some interviews. The result of the research demonstrates that there has been no policy in the forms of regional regulation that specifically regulates the rejuvenation and development of urban areas. Amid the fact, the Regional Government has attempted to implement policies by using the existing regional regulation in a more humanist means that give more considerations to the Human Rights aspects. However, not all residents have their entitlements to proper dwelling places been fulfilled due to the requirement of producing the Surabaya ID Card they must own. Consequently, it is recommended to the Administration of Surabaya City to consider the required Surabaya ID card as a condition to get a flat unit in view of the fact that all evicted residents have similar right to proper dwelling place. In addition, it is necessary to correct the methods in demolition of wild temporary constructions.

Keywords: City Rejuvenation, Eviction, Human Rights

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.

This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge

Donny Michael (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights*)

Supervision and Monitoring of Simultaneous Regional Head Election in the Province of Banten through Community Engagement in the Perspective of Human Rights

Human Rights Journal, Vol. 9, Number 1, July 2018, page 69 - 85

One of the most important parts of an election is the public roles and participation. Rational consideration to becoming smart voters must continuously be promoted, hence, it is expected that leaders and representatives of people with high integrity and quality may be elected. The issues of abstainism and bias of the organizing committee in this democratic big events may be made the grounds to involve the people in supervising and protecting the rights of the citizens to be voted for and to vote in the Regional Head Election. The purpose of this research is to identify the pattern used by the Elections Supervisory Agency in monitoring and overseeing the Regional Head Election, to identify the pattern of public involvement in the monitoring and supervision of Regional Head Election from the perspective of Human Rights, and to identify the barriers in the monitoring and supervision efforts of the Regional Head Election. This research employs qualitative method with analytical descriptive approach that will reveal the result systematically. By observing the institutional structure of the Elections Supervisory Agency, the pattern of public involvement in the elections supervision and monitoring has been in conformity to the perspective of Human Rights in particular those that relate to the principles of public participation and involvement. With regard to the pattern of public involvement beyond the institutional structure of the Elections Supervisory Agency, the Elections Supervisory Agency relies on the people's voluntary participation to act as a supervisor and watcher. This is to maintain independency and objectivity of the supervision and monitoring by the people.

Keywords: *Regional Head Election, Public Involvement, Human Rights*

Okky Chahyo Nugroho (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights*)

Completion Of Agrarian Conflict In Maluku Through Land Regulation In The Perspective Of Human Rights

Human Rights Journal, Vol. 9, Number 1, July 2018, page 87 - 101

Indonesian people are often confronted against problems related to the injustice when dealing with their rights over concession and utilization of agrarian resources. As a matter of fact, the agrarian injustice are sometimes initiated by some political policies at each change of government phases. The issues reviewed here are the roles of land regulations in the settlement of land conflicts in Maluku and indeed, the human rights will be an important issue in order to prevent the violation against the people's rights and settlement of the same. The purpose of this review is to describe the settlement of land conflicts within the context of human rights and regulations on land. The qualitative approach method employed in this paper with descriptive analysis on land issues in Maluku. The restrictive forms of Human Rights in the Land Bill deal with some important issues that must be described in the Land Bill, such as: indigenous people in Maluku have their own traditional characteristics and of course the Land bill should not arbitrarily limit the area of the land they hereditarily possessed for years, and eventually, the rights of the indigenous people must be respected, protected. The land bill must deal also with the land dispute settlement issues which include the involvement of non-judicial institutions (by negotiation, mediation, arbitration and customary justice), quasi-judicial institutions and judicial institutions. The customary justice under this Bill must be supported as this institution is preferred in settling conventional land disputes among the peoples in the Customary Law Societies.

Keywords: *Agrarian Conflict, Land Regulation, Human Rights*

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat

Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 1, Juli 2018, hal. 1 - 17

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga bahagia dan aman merupakan dambaan setiap orang berumah tangga. Apabila terjadi kekerasan maka akan menimbulkan ketidakamanan bagi penghuninya. Dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak maka negara dan masyarakat harus melakukan pencegahan, perlindungan, dan penindakan sesuai aturan. Tantangan yang dihadapi adalah kerangka hukum masih kurang optimal dalam mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak karena menganggap hukum diam di tempat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dan mencari solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak agar tercipta pola pengasuhan yang aman. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa peran orangtua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Seringkali kasus yang terjadi sudah diketahui, namun dianggap biasa dan cenderung ada pembiaran. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi orangtua yang mempunyai faktor resiko yang tinggi untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Kini saatnya memperlihatkan yang tidak terlihat dan sudah waktunya untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera membuat juklak dan juknis terkait pelibatan masyarakat sebagai pelindung dan pengawas anak di lingkungan sekitar rumah dan Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menyediakan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak beraktivitas.

Kata Kunci: Pencegahan, Kekerasan, Anak, HAM

Nicken Sarwo Rini (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 1, Juli 2018, hal. 19 - 36

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi melalui undang-undang yang materi muatan/ substansinya bersifat diskriminatif (mengandung pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik). Tulisan ini hendak menguraikan dua bagian yaitu: *pertama*, gambaran pengelompokan bentuk diskriminasi khususnya bagi kelompok rentan terhadap pemajuan hak pendidikan dan hak kesehatan; *kedua*, analisis berbasis HAM terhadap beberapa peraturan daerah provinsi tentang penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan. Adapun kesimpulan dalam tulisan ini adalah terdapat tiga bentuk basis diskriminasi yaitu: ekonomi, agama/ keyakinan, dan status sosial. Berdasarkan analisis HAM, materi muatan peraturan daerah provinsi tidak mengatur secara spesifik bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan bahwa kelompok rentan dapat mengakses hak atas pendidikan dan kesehatannya tanpa hambatan, kemudian tidak diatur juga mengenai mekanisme pengaduan terkait dengan pelanggaran HAM tersebut. Pada dasarnya implementasi penerapan prinsip non-diskriminasi esensinya adalah harus melindungi tindakan yang menentang adanya diskriminasi, hal tersebut dapat terwujud apabila didalam materi muatan/ substansi undang-undang mengatur dan memuat bahwa kelompok rentan dapat mengakses (secara fisik maupun ekonomi) hak atas pendidikan dan kesehatan tanpa hambatan dan didukung dengan adanya mekanisme pengaduan dan mekanisme gugatan untuk memperoleh keadilan ketika haknya dilanggar.

Kata Kunci: Implementasi, Non-Diskriminasi, Pendidikan, Kesehatan, Peraturan Daerah

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Frichy Ndaumanu (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur)

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 1, Juli 2018, hal. 37 - 49

Masyarakat hukum adat adalah bagian dari kelompok rentan dimana seringkali keberadaannya dan kedudukannya di dalam pemerintahan masih belum diakui ataupun sejajar sebagai subyek hukum. Dalam setiap segi perencanaan pembangunan daerah seringkali masyarakat hukum adat tidak diikutsertakan sehingga ketidaksinkronisasi yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah dapat menyebabkan konflik berujung pada sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendorong sebuah kebijakan nyata dalam upaya penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah melalui sebuah produk hukum daerah yang komprehensif dan implementatif khususnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penulisan ini menggunakan metode penelitian *socio-legal*, metode penelitian ini ialah metode yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum. Dari penulisan ini disimpulkan bahwa diperlukan sebuah kebijakan produk hukum daerah untuk menghormati dan melindungi masyarakat hukum adat yaitu sebuah rancangan peraturan daerah tentang penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Rancangan peraturan daerah tersebut harus dapat menjamin upaya pemberdayaan, pembinaan, penghormatan dan perlindungan MHA sebagai subyek pembangunan.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Penghormatan dan Perlindungan, Kabupaten Alor

Yuliana Primawardani (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya

Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 1, Juli 2018, hal. 51 - 68

Peremajaan dan pengembangan kawasan perkotaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan perbaikan, penataan dan memperindah kota. Akan tetapi pelaksanaannya seringkali melakukan pelanggaran HAM sebagai akibat adanya penggusuran, sehingga masyarakat kehilangan hak atas tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kebijakan berupa peraturan daerah yang secara khusus mengatur akan Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan. Walaupun demikian Pemerintah Daerah telah berupaya melaksanakan kebijakan berupa perda yang ada secara humanis dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia. Akan tetapi belum semua warga yang terpenuhi hak-haknya atas tempat tinggal yang layak karena adanya persyaratan berupa KTP Surabaya yang harus dimiliki. Oleh karena itu direkomendasikan agar Pemerintah Kota Surabaya perlu mempertimbangkan kepemilikan KTP Surabaya sebagai persyaratan mendapatkan rusun mengingat setiap warga yang tergusur memiliki hak yang sama atas perumahan yang layak. Selain itu juga perlu melakukan upaya koreksi dalam melakukan penertiban bangunan liar.

Kata Kunci: Peremajaan Kota, Penggusuran, Hak Asasi Manusia

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Donny Michael (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Propinsi Banten Melalui Pelibatan Masyarakat dalam Perspektif HAM

Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 1, Juli 2018, hal. 69 - 85

Salah satu bagian terpenting dari sebuah proses pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat. Pertimbangan rasional dengan menjadi pemilih cerdas perlu terus-menerus disosialisasikan, sehingga nantinya diharapkan dapat terpilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan kualitas yang tinggi. Permasalahan seperti golput dan ketidaknetralan penyelenggara dalam pelaksanaan dalam acara demokrasi yang melibatkan rakyat dapat dijadikan suatu alasan akan perlunya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan perlindungan hak-hak warga negara untuk dipilih dan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola Bawaslu dalam melakukan pemantauan dan pengawasan Pilkada, mengetahui pola pelibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan Pilkada dalam perspektif hak asasi manusia, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam upaya pemantauan dan pengawasan Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang akan mengungkapkan secara sistematis. Dalam struktur lembaga Bawaslu, pola pelibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan sudah sesuai dengan perspektif HAM terutama menyangkut prinsip partisipasi dan pelibatan masyarakat. Mengenai pola pelibatan masyarakat di luar struktur Bawaslu, pihak Bawaslu menyerahkan kepada kesukarelaan masyarakat untuk menjadi pengawas dan pemantau partisipatif. Hal ini untuk menjaga independensi dan obyektivitas pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Pelibatan Masyarakat, Hak Asasi Manusia

Okky Chahyo Nugroho (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 1, Juli 2018, hal. 87 - 101

Masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan yang terkait dengan ketidakadilan dalam mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Fakta ketidakadilan agraria seringkali dipicu oleh berbagai kebijakan politik pada setiap fase pemerintahan. Hal yang dikaji adalah mengenai peran regulasi pertanahan dalam penyelesaian konflik agraria di Maluku dan tentunya hak asasi manusia menjadi penting agar pelanggaran hak masyarakat dapat dihindari dan ditangani. Tujuan kajian ini adalah untuk mendiskripsikan penyelesaian konflik agraria dalam konteks hak asasi manusia dan regulasi tentang pertanahan. Metode pendekatan kualitatif digunakan dalam tulisan ini dengan deskriptif analisis terkait permasalahan pertanahan di Maluku. Bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan ada beberapa poin penting yang perlu dijelaskan dalam RUU Pertanahan tersebut, seperti: Masyarakat adat di Maluku mempunyai ciri khas dan tentunya RUU Pertanahan tidak serta merta membatasi kepemilikan tanah yang sudah dimiliki bertahun-tahun secara turun temurun sehingga hak masyarakat adat perlu dihormati, dilindungi. RUU Pertanahan perlu membahas penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan melalui lembaga non yudisial (negosiasi, mediasi, arbitrase dan peradilan adat), lembaga quasi-yudisial dan lembaga yudisial. Lembaga peradilan adat dalam RUU ini diberi penguatan kedudukan dimana lembaga tersebut ditujukan untuk penyelesaian sengketa pertanahan konvensional antar warga masyarakat dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Regulasi Pertanahan, Hak Asasi Manusia